

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Jepang merupakan negara kepulauan terbesar ketiga di dunia yang terletak di Asia Timur. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia terutama dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang didapatkan Jepang ini dikarenakan sumber daya manusia yang tinggi dan etos kerja yang besar. Namun dibalik kemajuan Jepang yang kita lihat saat ini terdapat masalah demografi yang melanda Jepang. Dimana angka kelahiran di Jepang terus turun setiap tahunnya. Di Jepang fenomena penurunan angka kelahiran dikenal sebagai fenomena *shoushika*¹. Fenomena *shoushika* adalah fenomena turunnya jumlah angka kelahiran di Jepang yang mempengaruhi kestabilan populasi. Keadaan ini mengakibatkan turunnya jumlah populasi usia subur yang merupakan sumber daya manusia di Jepang².

Data statistik resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jepang sekitar 124,34 juta penduduk. Yang mana didominasi oleh penduduk dengan usia lanjut yang mencapai 36,2 juta atau setara dengan 29,1% dari total penduduk³. Penurunan angka kelahiran yang dibarengi oleh populasi lansia yang mendominasi akan menyebabkan Jepang

¹ Bambang, P. (2020). *Budaya Omai Dan Fenomena Shoushika*. 10–37. <http://repository.unsada.ac.id/1975/2/BAB%20II.pdf>

² Amril, O. (15). Fenomena Shoushika Di Antara Sist

mengalami kekurangan tenaga kerja. Dan nantinya akan menjadi bom waktu dengan sedikitnya pekerja yang membayar pajak akan mempengaruhi sistem jaminan sosial⁴. Turunnya angka populasi Jepang secara stabil menjadi kekhawatiran bahwa basis ekonomi akan runtuh semakin menonjol. Populasi Jepang diprediksi akan turun hingga dibawah 80 juta penduduk pada tahun 2050⁵.

Keinginan masyarakat Jepang untuk tidak ingin mempunyai anak juga disebabkan oleh tingginya biaya hidup yang terkait dengan membesarkan anak. Memulai rumah tangga berarti menggandakan biaya, terutama jika sudah memiliki anak maka biaya juga meningkat seiring bertambahnya usia anak. Hal inilah yang membuat pemerintah Jepang membuat sebuah kebijakan dengan memberikan tunjangan anak⁶. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Jepang No.164 tahun 1947 yang mana tunjangan akan diberikan hingga anak mencapai usia 15 tahun. Namun kebijakan ini beberapa kali telah direvisi karena masih belum terlihat hasil yang memuaskan. Hingga tahun 2020 tunjangan anak diberikan hingga anak berusia 18 tahun sebesar 10.000 yen per anak⁷

⁴ World Economic Forum (2023) More than 1 in 10 people in Japan are Aged 80 or over. Here's how its ageing population is reshaping the country.

<https://www.weforum.org/agenda/2023/09/elderly-oldest-population-world-japan/>

⁵ Akashi, Junichi. "New aspects of Japan's immigration policies: is population decline opening the doors?" *Contemporary Japan*, vol. 26, no. 2, 2014, pp. 175-196. <https://doi.org/10.1515/cj-2014-0009>

⁶ Indahni, A., Raja, M., & Haji, A. (2022). *Regalia: Jurnal Gender dan Anak*. 1(2), 49–58. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jga/>

⁷ Kesulitan, S., Biaya, K., & Usaha, D. (2020). *Informasi Mengenai Bantuan Kelangsungan Hidup Informasi Tunjangan untuk Mendukung Kelangsungan Hidup*. April. <https://www.funabashi-multilingual.info/00844fbd5ef7f3699644a228cfd4769955418cb5.pdf>

Jepang dikenal sebagai negara yang penduduknya terkenal kecanduan bekerja. Loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan bahkan membuat pekerja Jepang tidak segan untuk bekerja lembur setiap hari dan tidak mengambil cuti tahunan. Ini disebabkan dunia kerja yang kompetitif dan ditakutkan akan merugikan saat mengambil cuti. Dibentuknya UU cuti mengasuh anak merupakan dukungan pemerintah Jepang bagi pekerja agar tidak dirugikan oleh perusahaan terkait cuti sebagai orang tua didalam lingkungan kerja⁸. Kebijakan cuti mengasuh anak dibuat pada tahun 1995 oleh Tomiichi Murayama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Diharapkan pekerja yang sekaligus orang tua akan memberikan kontribusi dalam tumbuh kembang anak sekaligus menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga⁹.

Selain biaya persiapan mental sebelum menjadi orang tua juga diperlukan. Setelah melahirkan, anak membutuhkan perhatian orang tua sepenuhnya hingga kadang para orang tua tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Pertimbangan inilah yang menjadi salah satu alasan pasangan Jepang untuk tidak memiliki anak. Sehingga pada tahun 1994, Pemerintah Jepang membuat program yang diberi nama *Angel Plan* untuk membantu para orang tua membesarkan anak¹⁰. Bantuan yang ditawarkan oleh program ini adalah konseling kepada orang tua dan mendorong agar ayah dapat mengambil lebih banyak peran dalam membesarkan

⁸ Fidy Ramzielah F. (2012). Undang-Undang Cuti Mengasuh Anak Untuk Mengatasi Shoushika Mondai Di Jepang Ditinjau Dari Faktor Sosial Budaya. *Japanology*, 1(1), 12–21. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-japanology5ed62402d32full.pdf>

⁹ Japanese Law Translation (2017) Undang-Undang tentang Cuti Pengasuhan Anak, Cuti Pengasuh, dan Tindakan Lain untuk Kesejahteraan Pekerja yang Mengasuh Anak atau Anggota Keluarga Lainnya <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3543/en>

¹⁰ Deutsches Institut fur Japanstudien (2008) Pengasuhan Anak dan Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan di Jepang yang Angka Kesuburannya Rendah. <https://www.dijtokyo.org/project/childcare-and-work-life-balance-in-low-fertility-japan/>

anak. Fokus dari program ini adalah pada peningkatan fasilitas penitipan anak dengan menambah lebih banyak pusat penitipan anak dan memperpanjang jam perawatan¹¹.

Dengan adanya kebijakan yang dibuat belum bisa mengurangi penurunan angka kelahiran yang melanda Jepang. berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang, jumlah kelahiran di Jepang menurun secara drastis selama pandemi Covid-19, dimana angka kelahiran pada 2019 ada pada 865,239 dan di tahun 2020 turun hingga menyentuh angka 840,883. Kemudian dengan konsisten menurun hingga pada tahun 2023 sekitar 758.631 bayi yang lahir di Jepang. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa jumlah kelahiran yang ada sejak tahun 2023 telah menjadi angka kelahiran terendah selama 90 tahun terakhir¹².

Perubahan demografis yang dialami oleh Jepang ini berdampak pada aspek makroekonomi dan ketahanan fiskal. Dalam aspek makroekonomi, dikhawatirkan penduduk yang sudah lansia akan sulit beradaptasi dengan teknologi baru sehingga nantinya akan mengurangi produktivitas total ekonomi. Pada ketahanan fiskal, menurunnya produktivitas akan diiringi dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Dampaknya berupa penurunan pendapatan

¹¹ Population Reference Bureau (2010) Japan's Demographic Future.
<https://www.prb.org/geographical-focus/japan/>

¹² Kompas.com (2024) Krisis Populasi di Jepang Masuk Level Krisis Terendah dalam 90 Tahun.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/29/203000465/krisis-populasi-di-jepang-masuk-level-kritis-angka-kelahiran-terendah-dalam?page=all#:~:text=Kementerian%20Kesehatan%20dan%20Kesejahteraan%20Jepang,di%20Jepang%20lahir%20pada%202023>

dan tabungan nasional, yang selanjutnya berimplikasi terhadap stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional¹³.

Seiring dengan turunnya populasi Jepang permintaan akan perumahan juga akan ikut menurun. Berkurangnya jumlah rumah tangga ini memicu jumlah persediaan rumah kosong dalam jumlah yang tidak sedikit. Berdasarkan Survei Statistik Perumahan dan Tanah pada tahun 2023 jumlah rumah terbengkalai mencapai 9 juta rumah¹⁴. Selain perumahan, turunnya populasi ini juga berdampak pada fasilitas umum. Banyak sekolah dan fasilitas kesehatan yang ditutup karena tidak dapat berfungsi terutama di desa dan kota kecil¹⁵.

Penurunan angka kelahiran yang tengah dihadapi oleh Jepang ini merupakan bom waktu yang akan berdampak buruk bagi Jepang jika tidak segera dicegah. Dampak signifikan yang dirasakan dari turunnya angka kelahiran adalah pada bidang ekonomi. Tenaga kerja yang dimiliki Jepang lebih sedikit dibanding dengan jumlah pensiunan. Sehingga permintaan layanan kesehatan akan meningkat secara substansial. Kondisi ini menempatkan tekanan finansial terhadap pemerintah dan masyarakat yang harus menanggung biaya yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan penduduk usia tua. Sementara penduduk usia produktif yang semakin menurun akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan

¹³ Sholihin, F. (2022). Global Migration sebagai Solusi Jepang dalam Menghadapi Aging Population melalui the Immigration Control and Refugee Recognition Act. *Jurnal Transborders*, 6(1), 50–62. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/download/3923/2990/31802>

¹⁴ Statistic Bureau of Japan (2023) <https://www.e-stat.go.jp/en/dbview?sid=0004015763>

¹⁵ The Japan Times (2023) School closures continue as Japan's population declines. <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/09/national/depopulation-school-closures/>

keberlanjutan dalam jangka panjang suatu negara¹⁶. Pada kondisi kritis ini pemerintah Jepang secara berkala telah membuat kebijakan dengan tujuan meningkatkan angka kelahiran. Namun sejauh ini kebijakan yang telah dibuat belum bisa membalikan kondisi demografi Jepang dan hanya menunda saja. Perubahan kondisi demografi ini ditakutkan akan melemahkan ekonomi Jepang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bahkan telah menjadikan pembalikan angka kelahiran sebagai prioritas nasional.

Dari data yang ditunjukkan diatas merupakan sebuah alasan kuat untuk peneliti meneliti permasalahan ini. Peneliti cenderung membahas era Fumio Kishida karena Covid-19 menjadi salah satu faktor terbesar Jepang mengalami penurunan angka kelahiran sehingga menarik untuk diteliti penyelesaian masalah seperti apa yang akan diambil oleh Perdana Menteri Fumio Kishida. Era Fumio Kishida menawarkan potensi perubahan kebijakan di bandingkan saat Yohiside Suga mengambil alih kepemimpinan Shinzo Abe. Dalam hal ini Fumio Kishida menjadi salah satu periode krusial untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah terhadap fenomena *Shoushika*.

Pada pemerintahan Fumio Kishida, ada beberapa upaya yang dilakukan seperti membuat beberapa kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kelahiran anak di Jepang. Salah satunya adalah pembentukan organisasi

¹⁶ Daffi Zaini, A. A., Najib, A., Dzulfikar, F., & Siti Logayah, D. (2023). Dinamika Penduduk Asia Timur: Studi Kasus Resesi Seks Di Jepang. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 7(3), 1–12.

administratif yaitu Badan Anak dan Keluarga¹⁷. Pembentukan badan ini diatur dalam Undang-Undang No.75 Tahun 2022. Undang-undang ini melanjutkan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak terkait anak-anak di Jepang seperti angka kelahiran yang rendah, kemiskinan anak, perundungan sekolah dan kejahatan seksual anak¹⁸. Tugas dari Badan Anak-anak dan Keluarga ini adalah untuk memperkuat tunjangan tunai bagi keluarga-keluarga sehingga akan lebih meringankan beban ekonomi disetiap keluarga. Badan ini juga bertugas untuk memberikan dukungan kepada perusahaan sehingga dapat memperluas cakupan sistem tunjangan bagi pegawai. Dengan mempertimbangkan pola asuh anak, pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan jam kerja yang *flexibel* bagi orang tua¹⁹.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas yang membahas mengenai Fenomena, maka penelitian ini membahas “Bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi penurunan angka kelahiran (*Shoushika*) di Jepang pada era Fumio Kishida?”

¹⁷ Tribun News (2021) Partai Komeito Jepang Usulkan Pembentukan Badan Keluarga dan Anak. <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/05/30/partai-komeito-jepang-usulkan-pembentukan-badan-keluarga-dan-anak>

¹⁸ Library of Congress (2022) Jepang : Undang-Undang Pembentukan Badan Perlindungan Anak dan Keluarga Disahkan. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-09-07/japan-children-and-family-agency-establishment-act-adopted/>

¹⁹ The Japan Times (2023) Jepang Mengumumkan Garis Besar Kebijakan Penitipan Anak yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya. <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/03/31/national/child-care-measures-draft/>

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

- a. Menggambarkan dan menjelaskan mengenai fenomena *Shoushika* di Jepang pada tahun Perdana Menteri Fumio Kishida menjabat mulai dari 4 oktober 2021 hingga dengan 1 Oktober 2024.
- b. Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pada era Fumio Kishida untuk mengatasi fenomena *Shoushika* di Jepang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Akademis

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan di masa mendatang sebagai rujukan ide dan informasi bagi mahasiswa hubungan internasional yang ingin membahas politik domestik yang di ambil oleh Jepang dalam rangka mengatasi fenomena *shoushika* yang ada di Jepang. Dalam penelitian ini membahas penyebab dan kebijakan yang diambil oleh Jepang untuk mengatasi masalah *shoushika* ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil peneltian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran serta refrensi pelengkap bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi masukan maupun pelengkap bagi studi lanjutan yang relevan dengan upaya dari pemerintah Jepang dalam mengatasi penurunan angka kelahiran (*Shoushika*) di Jepang pada Era Fumio Khasida.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian upaya dari pemerintah Jepang dalam meningkatkan angka kelahiran di Jepang mengambil beberapa literatur sebagai referensi dari penelitian ini. Literatur yang pertama adalah jurnal yang diteliti oleh Rudy Gunawan Mailoor yang diberi judul “Dampak *Shoushika* Terhadap Masyarakat Jepang Saat Ini”. Penelitian ini membahas tentang latar belakang terjadinya *Mikonka*, *Bankonka* serta menunda kelahiran anak.

Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa telaah literatur atau studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik literatur, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber dan informasi yang berkaitan dengan *Shoushika*.

Penelitian ini membahas fenomena sosial yang dikenal sebagai *shoushika*, yaitu penurunan angka kelahiran secara bertahap di suatu negara. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti fenomena *mikonka* dan *bakonka* (menunda atau tidak menikah), keterlambatan dalam memiliki anak, meningkatnya partisipasi perempuan Jepang dalam dunia kerja, ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga, dan faktor-faktor lainnya²⁰.

Penelitian terdahulu ke dua dilakukan oleh Camelia Rabbayani dan Chomsah yang berjudul “Dampak Pengaruh Fenomena *Shoushika* Terhadap Perekonomian Jepang”. Fokus dari penelitian ini adalah langkah-langkah yang

²⁰ Belakang, A. L., & Jepang, N. (2020). *BAB 1-Dampak Shoushika*. 1–7. <http://repository.stba-jia.ac.id/id/eprint/91>

diambil oleh pemerintah untuk menangani tren penurunan tingkat kelahiran yang terus terjadi.²¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian literatur, yaitu dengan menelusuri beberapa dokumen dan sumber-sumber akademis dan pustaka terkait. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menarik kesimpulan bahwa fenomena *shoushika* merupakan tantangan signifikan bagi individu, sektor bisnis, dan pemerintah Jepang. Ke depannya, diperkirakan Jepang akan menghadapi kebutuhan besar akan tenaga kerja demi mempertahankan stabilitas ekonominya. Kebutuhan akan pekerja di sektor-sektor ekonomi penting yang juga menghadapi masalah *Shoshika* akan menjadikan Jepang sebagai negara yang membutuhkan pekerja dari luar wilayah Jepang. Pemerintah Jepang telah mengambil berbagai langkah strategis guna menangani dampak yang ditimbulkan oleh fenomena *shoushika*, termasuk krisis energi, meningkatnya beban pengeluaran, serta penurunan pendapatan nasional. Meskipun demikian, hasil dari upaya tersebut belum menunjukkan pencapaian yang jelas dan terukur²².

Penelitian terdahulu yang ketiga diteliti oleh Jonny Andika, Neng Murialti dan Dwi Widiarsih yang berjudul "*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Fenomena Shoushika Di Negara Jepang*". Penelitian ini membahas mengenai angka kelahiran yang menurun terus menerus setiap tahun sehingga populasi di Jepang mengalami penurunan angka usia produktif. Dalam penelitian

²¹ Camelia Rabbayani, Chomsah (2022) Dampak Fenomena Shoushika Terhadap Perekonomian Jepang. Dapat di akses melalui <http://repository.unsada.ac.id/4159/>

²² Influence, T., The, O., Phenomena, S., The, O., Economy, J., Nurtyandini, R. T., & Kemalasari, R. (2023). *Hal+15-29. 1*, 15–29. <https://doi.org/10.22303/pir.v8i1.2>

ini juga membahas mengenai bagaimana angka tenaga kerja wanita, jumlah penduduk produktif dan jumlah pasangan menikah dapat mempengaruhi angka kelahiran di Jepang²³.

Penelitian terdahulu yang keempat ditulis oleh Mochamad Bintang Putra Eryano, Nurul Amaliah Isnani, Yafi Annisa P, Dyah Lukita W, Khirul Rizal A, Ichlasul Ayyub yang berjudul “*Faktor Aging Population di Jepang dan Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Fenomena Tersebut*”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana solusi dari pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahan *Aging Population*, dan juga bagaimana strategi dari pemerintah Jepang untuk mengatasi turunnya grafik angka kelahiran yang ada di Jepang.²⁴

Penelitian terdahulu yang kelima diteliti oleh Mayang Terapulina, Ihsan Hikattullah, Maudyta Dwi Puteri, Qotrun Nada Aulia, Nur Safa Safira dengan judul “*Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe*” Penelitian ini membahas dampak penurunan angka kelahiran yang menjadi ancaman serius bagi sektor ekonomi dan keamanan Jepang. Berkurangnya jumlah penduduk usia produktif menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang berpengaruh pada stabilitas perekonomian negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan

²³ Jonny Andika, Neng Murialti, Dwi Widiarsih (2024) Analisis Faktor yang mempengaruhi Timbulnya Fenomena Shoushika di Negara Jelang.

²⁴ Mochamad Bintang Putra Eryano, Nurul Amaliah Isnani, dkk (2023) Faktor Aging Population di Jepang dan Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Fenomena Tersebut. Vol 18, No 2. Dapat di akses pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/62466/25846>

Shinzo Abe merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menanggulangi dampak negatif dari fenomena ini.²⁵

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber referensi. Data dikumpulkan dan dianalisis dari jurnal internasional, *e-book*, buku, dan situs web lembaga resmi Jepang.

No	Judul dan Nama Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dampak <i>Shoushika</i> Terhadap Masyarakat Jepang Saat Ini	Dalam penelitian ini diterapkan metode deskriptif kualitatif, sedangkan data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka.	Shoushika merupakan fenomena sosial yang ditandai oleh penurunan angka kelahiran secara bertahap di suatu negara. Beberapa faktor yang memicu terjadinya shoushika antara lain adalah mikonka dan bankonka (tren tidak menikah dan menikah di usia yang lebih tua), penundaan dalam memiliki anak, meningkatnya partisipasi perempuan Jepang di dunia kerja, serta pembagian tanggung jawab domestik yang tidak seimbang.
2.	Pengaruh Fenomena <i>Shoushika</i> Terhadap Perekonomian Jepang	Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik kajian literatur dalam pendekatan kualitatif.	Fenomena shoushika menjadi tantangan signifikan bagi individu, pelaku usaha, dan pemerintah di Jepang. Di masa mendatang, Jepang akan memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menopang perekonomiannya. Permintaan tenaga kerja di sektor-sektor yang juga terdampak shoushika membuat Jepang harus bergantung pada pekerja asing. Berbagai tindakan telah diambil

²⁵ Mayang Terapulina, Ihsan Hikatullah, dkk (2021) Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe. Vol 4 no 2

			oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi dampak <i>shoushika</i> , seperti krisis energi, tingginya pengeluaran, dan penurunan pendapatan negara, namun pencapaian hasilnya belum tampak secara signifikan.
3	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Fenomena <i>Shoushika</i> Di Negara Jepang	Penelitian menggunakan studi pustaka	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena <i>Shoushika</i> ini terjadi di karenakan banyak faktor baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Karena budaya kerja di jepang dan juga tingginya jumlah tenaga kerja membuat perempuan Jepang enggan memiliki anak, budaya patriarki juga menjadi salah satu aspek yang mendorong wanita enggan memiliki anak sehingga terjadinya penurunan angka kelahiran.
4.	Faktor <i>Aging Population</i> di Jepang dan Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Fenomena Tersebut	Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari jurnal serta sumber di internet.	Beberapa faktor yang menyebabkan fenomena <i>Shoushika</i> di Jepang meliputi biaya hidup yang tinggi, keterbatasan dukungan pengasuhan anak, perubahan pola pernikahan, dan perubahan nilai serta gaya hidup. Pemerintah Jepang pun berupaya menangani masalah ini melalui berbagai program yang dirancang untuk mengatasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
5.	Fenomena <i>Shoushika</i> : Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe	Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.	Fenomena penurunan angka kelahiran di Jepang membawa dampak terhadap keamanan non-tradisional di negara tersebut. Berkurangnya jumlah penduduk usia produktif menjadi salah satu ancaman bagi aspek keamanan, budaya, sosial, dan demografi di Jepang. Sehingga pada era Shinzo Abe mengusahakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara meningkatkan

			fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang dan menguntungkan bagi keluarga yang mempunyai anak sehingga di harapkan akan membuat masyarakat Jepang lebih bisa mempertimbangkan keuntungan dengan memiliki anak.
--	--	--	---

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur sumber daya publik. Pada dasarnya, kebijakan melibatkan pengelolaan serta pendistribusian sumber daya alam, keuangan, dan manusia secara langsung demi kepentingan masyarakat. Studi mengenai kebijakan publik meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan pada tingkat nasional, regional, maupun lokal melalui undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah di tingkat kabupaten dan kota²⁶.

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dengan tujuan khusus yang diikuti dan dijalankan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan isu yang perlu diperhatikan. Kebijakan publik merupakan konsep yang dinamis yang mana tidak hanya mempelajari tentang proses sebuah pengambilan keputusan, Namun, kajian ini juga mencakup pemahaman terhadap

²⁶ Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan*. 11–47.

dinamika yang berlangsung saat kebijakan tersebut diambil keputusan dan diterapkan²⁷.

Kebijakan publik adalah sebuah proses yang terus menerus sehingga yang paling penting adalah siklus kebijakan. Namun, penting bahwa kebijakan publik mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Kebijakan negara pada tahap awal merupakan keputusan terkait tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah.
- b. Kebijakan publik tidak hanya perlu diumumkan, tetapi juga harus dilaksanakan secara nyata dan terukur..
- c. Kebijakan publik yang baik, baik untuk dilakukan maupun tidak dilakukan, didasarkan pada tujuan dan sasaran yang spesifik.
- d. Kebijakan publik harus selalu ditujukan untuk melayani kepentingan seluruh anggota masyarakat.²⁸

Sebuah kebijakan berasal dari aktor tunggal atau kolektif yang melaksanakan program dan tindakan bertujuan. Kebijakan publik yang tertuang pada peraturan-peraturan bersifat memaksa. Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peraturan atau undang-undang..

James E. Anderson juga mengklasifikasikan Kebijakan Publik ke dalam 4

Macam:

1. *Substantive dan Procedural Policies*

²⁷ Sujarwoto. (2020). *Dinamika Konsep Kebijakan Publik*. 6. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6106-M1.pdf>

²⁸ Islamy, M.Irfan. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Substantive yaitu, jenis kebijakan ini biasanya dilihat dari permasalahan pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan contohnya melarang penjualan narkoba, memberikan tunjangan untuk kesejahteraan masyarakat dan sejenisnya. *Procedural* biasanya dilihat dari orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ini, dan biasanya banyak pihak yang terlibat mulai dari pihak berwenang hingga dengan presiden biasanya untuk kebijakan ini mempunyai hasil produk administratif yaitu undang-undang yang mengesahkan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.

2. *Distributive, Redisbutive, and regulatory policies*

Distributive merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian manfaat atau layanan kepada individu maupun kelompok tertentu.

Redisbutive mengatur mengenai alokasi ulang kekayaan atau hak-hak yang dimiliki oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Sementara itu,

Regulatory (regulatory policy) berfungsi untuk membatasi atau melarang tindakan tertentu yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.

3. *Material policy*

4. *Material policy* merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya material yang bersifat nyata bagi para penerima manfaat. Kebijakan ini bersifat kasatmata karena wujudnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti layanan kesehatan,

subsidi pendidikan, serta berbagai bentuk pelayanan publik lainnya yang berhubungan dengan distribusi sumber daya material.

5. *Public Good and Private Goods Policy*

6. **Public Goods Policy** merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan fasilitas oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, dengan tujuan melayani kepentingan publik atau orang banyak. Sementara itu, **Private Goods Policy** adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa oleh pihak swasta yang ditujukan untuk kepentingan individu, di mana akses terhadap layanan tersebut biasanya memerlukan imbalan atau pembayaran tertentu.²⁹

Konsep kebijakan publik jika dikaitkan dengan bagaimana Era Fumio Kishida mengatasi fenomena *shoushika* yang ada di Jepang akan dapat diidentifikasinya jenis kebijakan yang diambil dan juga dapat diketahui bagaimana upaya pemerintah pada era Fumio Kishida dalam menangani fenomena tersebut melalui kebijakan yang dikeluarkan.

James E Anderson juga mengemukakan tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. secara umum kebijakan public oleh Anderson di bagi dalam lima tahapan :

1. Formulasi Masalah

Sebagai tahap awal dimana masalah sosial atau kebutuhan masyarakat diidentifikasi

²⁹ Prof. Dr. H. Endang Soetari, A.D., M.Si (2018) Kebijakan Publik. Hlm 56-57

2. Formulasi Kebijakan

Tahap ini berfokus pada pengembangan berbagai pilihan atau alternatif solusi untuk pemecahan masalah.

3. Adopsi/ Penentuan Kebijakan

Tahapan dimana kebijakan telah diformulasikan, dipilih dan disahkan secara resmi oleh otoritas yang bertanggung jawab

4. Implementasi Kebijakan

Tahap sebuah kebijakan diwujudkan dalam tindakan nyata

5. Evaluasi Kebijakan

Tahap akhir, dalam hal ini dampak dan efektifitas kebijakan yang telah diimplementasikan dinilai.³⁰

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode / Tipe Penelitian

Menurut Creswell, metode penelitian adalah rencana dan prosedur yang memuat langkah-langkah metode pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data metode penelitian,³¹ sehingga metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Penurunan Angka Kelahiran (*shoushika*) di era Pemerintahan Fumio Khisida” adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

³⁰ UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015) Kebijakan Publik hlm 86.

³¹ John W. Creswell (2017) Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed

1.6.2 Teknik Analisa Data

Dalam studi literatur, data dikumpulkan dengan membaca dan mengkaji berbagai referensi tertulis yang sesuai dengan topik. Informasi tersebut disusun secara runtut berdasarkan teori yang digunakan, lalu disimpulkan secara deskriptif.³²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penggambaran fenomena secara mendalam dan sistematis, maka pengumpulan datanya melalui buku maupun website Jurnal, artikel online, portal berita resmi internasional seputar *Shoushika* dan kebijakan dari Era Fumio Kishida dalam mengatasi permasalahan *Shoushika*. Kemudian data tersebut diolah dan digunakan didalam penelitian ini sehingga dapat mendukung penelitian ini.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak keluar dari pembahasan Rumusan Masalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang bagaimana Upaya Pemerintah Jepang untuk Mengatasi Penurunan Angka Kelahiran (*shoushika*) pada era kepemimpinan Fumio Khisida ditahun 2021-2024 Agustus.

1.7 Argumentasi Pokok

Berdasarkan rumusan masalah dan teori kebijakan publik, penulis menyimpulkan bahwa fenomena *Shoushika* turut memengaruhi penurunan tingkat

³² Sugiyono (2018) Metode penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D. hlm 18

kelahiran di Jepang. Penduduk Jepang diprediksi akan menyusut menjadi sekitar 116,62 juta jiwa pada tahun 2030, dan jumlah tersebut akan semakin berkurang hingga mencapai 86,74 juta jiwa pada tahun 2060. Pada tahun 1947 pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang nantinya akan dianalisis didalam Landasan Konseptual Kebijakan Publik yaitu Undang-undang yang mengatur tentang tunjangan anak dan sudah direvisi beberapa kali hingga tahun ini. Selain itu ada juga kebijakan cuti hamil untuk para wanita pekerja untuk meringankan beban bagi pekerja yang sedang hamil. Upaya-upaya yang dilakukan Jepang ini ternyata masih belum memberikan dampak signifikan. Ini dapat dilihat dari angka kelahiran Jepang yang malah turun setiap tahunnya. Masalah demografi ini terbilang cukup darurat bagi Jepang karena dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Turunnya angka kelahiran ini menyebabkan perekonomian Jepang ikut melemah dikarenakan Jepang kekurangan tenaga kerja. Selain itu banyak juga fasilitas-fasilitas umum yang ditutup dikarenakan sudah tidak berfungsi lagi terutama yang berada di daerah pedesaan dan di kota-kota kecil.

1.8 Sistematika Penulisan

<p>BAB I Pendahuluan</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Metode/ Tipe penelitian 1.6.2 Teknik Analisis Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Argumentasi Pokok</p>
-------------------------------------	--

	1.8 Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran penurunan angka kelahiran di Jepang	2.1 Penurunan angka kelahiran di Jepang 2.2 Dinamika Penurunan Angka Kelahiran pada tahun 1980-2023 2.2.1 Fenomena <i>Aging Population</i> Di Jepang Sebagai Dampak Dari <i>Shoushika</i> 2.2.2 Penurunan Tenaga Kerja di Jepang Sebagai Dampak Dari <i>Shoushika</i> 2.2.3 Tingginya Beban Pendanaan Pensiun Lansia dan Kesejahteraan Lanjut Usia di Jepang sebagai Dampak dari <i>Shoushika</i> 2.2.4 Penurunan Pertumbuhan Ekonomi di Jepang sebagai Dampak dari <i>Shoushika</i> 2.3 Upaya Perdana Menteri Shinzo Abe Dalam Meningkatkan Angka Kelahiran di Jepang 2.4 Kebijakan Perdana Menteri Yohiside Suga dalam Mengatasi Fenomena <i>Shoushika</i> di Jepang 2.5 Fenomena <i>Shoushika</i> pada Era Fumio Kishida
BAB III Upaya pemerintah dalam meningkatkan angka kelahiran	3.1 Upaya Pemerintah era Fumio Kishida Dalam Mengatasi Fenomena <i>Shoushika</i> 3.1.1 Peningkatan Dukungan Untuk Keluarga Muda dan Pengasuhan Anak 3.1.2 Kebijakan Melahirkan dan Cuti Ketenagakerjaan 3.1.3 Infrastrukur Anak 3.1.4 Pembuatan Aplikasi Kencan 3.2 Analisis Upaya Pemerintahan di Era Fumio Kishida dalam mengatasi fenomena <i>shoushika</i> menggunakan konsep kebijakan publik
BAB IV PENUTUP	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran